



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 75 /2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi/alih tugas para Pejabat/Pegawai Pemungut (Kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan baik PNS maupun yang non PNS, maka untuk tertib dan lancarnya pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tabalong, perlu meninjau dan menetapkan kembali Petugas Pemungut (Kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pemungut (Kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan daftar Petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator Pemungut (Kolektor) di Wilayah Kecamatan Jaro, Muara Uya, dan Upau:

1. memastikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah berdasarkan atau sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
2. memastikan terdistribusinya SPPT kepada Wajib Pajak;
3. melakukan pengawasan terhadap setoran uang hasil pungutan PBB-P2 dari para Kolektor Kecamatan atau Kolektor Kepala Desa/Lurah;
4. memastikan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam setelah terima uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 tersebut Petugas Pemungut (Kolektor) Kecamatan atau Kolektor Desa/Kelurahan Wajib menyetorkannya ke Bank Kalimantan Selatan atau Loker Pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dengan menggunakan SPPT;
5. untuk memudahkan pengontrolan supaya membuat administrasi Khusus PBB-P2; dan

6. membuat Laporan Pemungutan PBB-P2 setiap bulannya ke Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian.

b. Petugas Pemungut (Kolektor) Kecamatan:

1. mendistribusikan SPPT kepada Wajib Pajak melalui kolektor Kecamatan dalam Kabupaten Tabalong;
2. menerima setoran uang hasil pungutan PBB-P2 dari para Kepala Desa/Lurah dalam keadaan kotor (bruto) beserta Daftar Setoran Harian (DSH); dan
3. dalam jangka waktu 1 kali 24 jam setelah terima uang hasil pungutan PBB-P2 tersebut pada angka 1 di atas Petugas Pemungut (Kolektor) Kecamatan Wajib menyetorkannya per Desa/kelurahan ke Bank Kalimantan Selatan cabang Tanjung atau Bank Kalimantan Selatan cabang Pembantu di Kecamatan yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melampirkan Daftar Setoran dimana jumlah pajak yang disetorkan adalah jumlah kotor (belum dikurangi upah pungut).

c. Petugas Pemungut (Kolektor) Desa/Kelurahan:

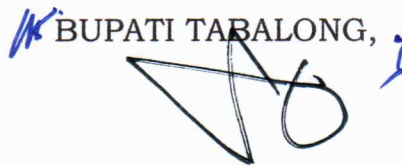
1. meneliti blangko SPPT dan PBB-P2 berdasarkan atau sesuai dengan DHKP yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
2. menyampaikan SPPT yang telah diteliti kepada para Wajib Pajak di Wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
3. memungut dan melaksanakan penagihan langsung PBB-P2 Bidang Persawahan, Perladangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Perumahan dari para Wajib Pajak di Desa/Kelurahan masing-masing sesuai dengan SPPT atau DHKP kemudian setiap Wajib Pajak yang telah membayar pajaknya wajib/harus dicatat dalam DSH dan ditutup setiap hari;
4. setiap hari uang Pajak yang telah dipungut oleh Kolektor Desa atau Kolektor Kelurahan, wajib disetorkan kepada Petugas Pemungut (Kolektor) Kecamatan atau ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam jumlah bruto (belum dikurangi upah pungut) disertai dengan DSH; dan
5. untuk memudahkan pengontrolan, Kepala Desa/Lurah supaya membuat administrasi Khusus PBB-P2.

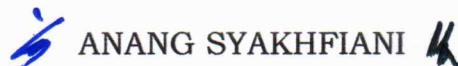
KETIGA

: Petugas Pemungut (Kolektor) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Februari 2022

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Petugas yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

KOORDINATOR PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KECAMATAN JARO,
MUARA UYA, DAN UPAU TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	RISMA YANTI, S.P.	KOORDINATOR PEMUNGUT (KOLEKTOR)	JARO, MUARA UYA, UPAU

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI WILAYAH
KECAMATAN SE-KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	BURHAN, S.Sos. / 19670603 199703 1 005	KASI TRANTIB	BANUA LAWAS
2.	H. AMRUN NAFI / 19751104 200701 1 011	KASI PEMBANGUNAN	PUGAAN
3.	MASRUNI, S. Sos./ 19680225 198601 1 001	KASI PEMBANGUNAN	KELUA
4.	MULIADI / 19700514 200906 1 004	STAF KASI PEMERINTAHAN	MUARA HARUS
5.	ARDIANSYAH / 19660214 200701 1 016	STAF PEMERINTAHAN	TANTA
6.	SYAHRANI, A.Md. / 19660212 199103 1 016	KASI PEMBANGUNAN	TANJUNG
7.	Hj. RITA EVIYANI/ 19690129 199803 2 005	KASI PEMBANGUNAN	MURUNG PUDAK
8.	HADIJAH, A.Md. / 19830129 200501 2 013	KASI PEMBANGUNAN	HARUAI
9.	BUDI BARLI S, A.Md / 19641116 199103 1 008	KASI PEMBANGUNAN	BINTANG ARA
10.	ZAINAL IBAD / 19700105 200701 1 050	BENDAHARA PENERIMAAN	UPAU
11.	NOVERENESIUS / 19671128 200701 1 015	STAF TRANTIB	MUARA UYA
12.	H.ABDUL KARIM,A.Md.Kep / 19650722 198703 1 011	KASI PEMBANGUNAN	JARO

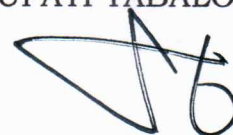
BUPATI TABALONG, 
ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI WILAYAH
KELURAHAN SE-KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	AZWAR RIZANINOR/ 19821011 200901 1 006	KASI PEMERINTAHAN PULAU	KELUA
2.	HJ. ELLAWATI, S.SOS. / 19680621 198903 0 007	KASI PEMBANGUNAN TANJUNG	TANJUNG
3.	MUSTAPA KAMAL P, A.MD. / 19711228 200801 1 007	KASI PEMBANGUNAN JANGKUNG	
4.	HJ. NOORLIANI, S.AP./ 19730301 20071 2 006	KASI PEMBANGUNAN AGUNG	
5.	ERMA PUSPITA/ 19661106 198603 2 006	KASI PEMERINTAHAN HIKUN	
6.	AKHMAD GAZALI, S.Pd./ 19790219 201001 1 003	KASI KESRA KEL. SULINGAN	MURUNG PUDAK
7.	HESTY / 19686131 98910 2 001	KASI PEMBANGUNAN KEL. PEMBATAAN	
8.	ERNA HERNIYATI, S.Sos. / 19791125 201101 1 004	KASI PEMBANGUNAN KEL. BELIMBING	
9.	HELDA RINA, S.AP. / 19801229 201001 0 016	SEKRETARIS LURAH BELIMBING RAYA	
10.	RUSNITA RAHNI, SE. / 19700826 200604 2 006	KASI PEMBANGUNAN KEL. MABUUN	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

DAFTAR NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
WILAYAH DESA SE-KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	SAIFULLAH, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN BANUA LAWAS	BANUA LAWAS
2.	MILAWATI	KASI PEMERINTAHAN BUNGIN	
3.	JARI AHMAD, S.Pd.I.	KASI PEMERINTAHAN SEI. DURIAN	
4.	NABHAN	KASI PEMERINTAHAN BATANG BAYU	
5.	ASPIHANNOR, S.Pd.I.	KASI PEMERINTAHAN PEMATANG	
6.	REYDO WAHYUDINNATA	KASI PEMERINTAHAN HARIANG	
7.	RIZKA, S.Pd.	KASI PEMERINTAHAN SEI. ANYAR	
8.	BASUKI RAHMAT	KAUR KEUANGAN BANGKILING	
9.	RUSMINAH	KASI PEMERINTAHAN BANGKILING RAYA	
10.	RAHMAT RIJALI HADI, S.Pd.	KAUR KEUANGAN HAPALAH	
11.	BIJURI	KASI PEMERINTAHAN BANUA RANTAU	
12.	JUNAIDI	KASI PEMERINTAHAN PURAI	
13.	TABERI	KASI PEMERINTAHAN HABAU	
14.	MASKUNI	KASI PEMERINTAHAN HABAU HULU	
15.	BURJANI, S.Pd.I.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN TALAN	
16.	Hj. SRI BUDIARTI	STAF UMUM SEI. RUKAM I	PUGAAN
17.	ARDIAN	KAUR UMUM SEI. RUKAM II	
18.	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Sos.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN HALANGAN	
19.	HIDAYATULLAH	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN PUGAAN	
20.	FAKHRURRAZI	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN TAMUNTI	
21.	DAUD YAHYA	KASI PEMERINTAHAN JIRAK	
22.	ARPAN RIPANI	SEKDES PAMPANAN	
23.	AHMAD ARIFIN	KAUR UMUM KARANGAN PUTIH	KELUA
24.	HENDRA	KASI PEMERINTAHAN BINTURU	
25.	IRWAN SUANDI	KASI PELAYANAN PALIAT	
26.	MUHAMMAD MISRIYADI, S.Pd	KASI PEMERINTAHAN MASINTAN	
27.	RAHMAT KURNIA	KASI PEMERINTAHAN SEI. BULUH	
28.	NOR ATINA	STAF UMUM PASAR PANAS	
29.	MISRAN	KASI KESRA BAHUNGIN	
30.	JUMIATI	SEKDES TAKULAT	
31.	SAHIBUL FADILLAH, S. Pd.	SEKDES AMPUKUNG	
32.	H.M YUSUF	KASI PEMERINTAHAN PUDAK SETEGAL	
33.	M. SUPIANOR	STAF UMUM TELAGA ITAR	
34.	RUDY	KASI PELAYANAN TANTARINGIN	MUARA HARUS
35.	HASAN	KAUR UMUM HARUS	
36.	EKA ISWIN	KASI PEMERINTAHANMANDUIN	
37.	RAUDATINA	STAF MURUNGKARANGAN	
38.	AKHMAD SYARIF	SEKDES MANTUIL	
39.	DEWI RATNA SARI	STAF UMUM PADANGIN	
40.	RUSDIANSYAH	KASI PEMERINTAHAN MADANG	
41.	RAJUDIN	KADES WALANGKIR	TANTA
42.	MULYADI	KADES PULAU KU'U	
43.	RAJULI	KADES TAMIYANG	
44.	DEDY UJANG, SE.	KADES WARUKIN	
45.	BAMUKTI	KADES PADANG PANJANG	
46.	RAHMADI	KADES PADANGIN	
47.	ARIE KURNIAWAN	KADES BARIMBUN	
48.	SYAKERANI	KADES LUK BAYUR	
49.	M. SYAHRIALUDDIN	KADES MANGKUSIP	
50.	BUDI IRIANTO, S.P.	KADES TANTA	
51.	MUYADI	KADES TANTA HULU	
52.	H. APELANDI, S.Pd, M.Si.	KADES PUAIN KANAN	
53.	H. AKHMAD FAUJI	KADES PAMARANGAN KANAN	
54.	AHMAD MAIDI	SEKDES MURUNG BARU	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
55.	TAUFIK RAKHMAN	KASI PELAYANAN PAMARANGAN KIWA	TANJUNG
56.	JAINAL ABIDIN	KADES PUAIN KIWA	
57.	MAWARNI	KASI PEMERINTAHAN SEI PIMPING	
58.	RUMINI, S.PD.	SEKDES BANYU TAJUN	
59.	DODDY SETIADI	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN MAHE SEBERANG	
60.	NORPIYANTI	STAF KEUANGAN GARUNGGUNG	
61.	HAMDI	KAUR KEUANGAN JUAI	
62.	HATMAWATI	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN KITANG	
63.	M. IMANSYAH	KASI PEMERINTAHAN WAYAU	
64.	ARBANI, S.Pd.I.	KADES KAMBITIN	
65.	TAMHUDI	KASI PELAYANAN KAMBITIN RAYA	
66.	SITI RAUDAH	KAUR UMUM KAPAR	MURUNG PUDAK
67.	NURBAYAH	KAUR UMUM MASUKAU	
68.	MAWARDI	KAUR UMUM KASIAU	
69.	YUNITA	SEKDES KASIAU RAYA	
70.	EDY RAHMANTO, SE.	KADES MABURAI	
71.	ARJANI	SEKDES HALONG	HARUAI
72.	AGUS SETIAWAN	KASI PEMERINTAHAN HAYUP	
73.	HABIBI	SEKDES NAWIN	
74.	AGUS ERWANSYAH	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN BONGKANG	
75.	GUSLIANI	KASI KESRA WIRANG	
76.	JUHRI	KASI PEMERINTAHAN MARINDI	
77.	TAJUDINNOR ARIFIN	KADES SARADANG	
78.	YULIANA	KASI KESRA LOK BATU	
79.	HIDAYAT	SEKDES KEMBANG KUNING	
80.	DINI ALLIANI	KASI PELAYANAN CATUR KARYA	
81.	HUSAINI	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN SUPUT	
82.	YALENRIANUS WARA	KASI KESRA SURIYAN	
83.	FATUR RAHMAN	KASI PELAYANAN MAHE PASAR	
84.	ANDRA FAHREZA	KAUR UMUM BINTANG ARA	BINTANG ARA
85.	HADIANOR	KAUR UMUM WALING	
86.	JARNI	KAUR UMUM BURUM	
87.	SITI MAISAROH	KASI PEMERINTAHAN ARGO MULYO	
88.	MAJRI	KAUR UMUM USIH	
89.	SAPUAN HIDAYAT	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN BUMI MAKMUR	
90.	MANSURI	KASI PEMERINTAHAN PANAAN	
91.	YONEDI	KAUR UMUM DAMBUNG RAYA	
92.	DIAN JUENDA	KAUR UMUM HEGAR MANAH	
93.	HERDOLIS	KASI KESRA PANGELAK	UPAU
94.	WELIDA DANIANSIH	KASI PEMERINTAHAN BILAS	
95.	DADIANSYAH	KASI PEMERINTAHAN KAONG	
96.	RENI ANDINI, A.Md. Keb	KASI PELAYANAN KINARUM	
97.	CHRISTIAN CAHAYANING A	KASI PEMERINTAHAN MASINGAI I	
98.	ANDIS SUKMA	KASI PEMERINTAHAN MASINGAI II	
99.	H. SAIFUL BAHRI	KAUR UMUM MUARA UYA	MUARA UYA
100.	SITI HASANAH	KASI PEMERINTAHAN PASAR BATU	
101.	MUHAJIR	KASI PEM RIBANG	
102.	SUPIA APRIANI	KASI PEM KAMPUNG BARU	
103.	MURJANI	KAUR KEUANGAN KUPANG NUNDIR	
104.	HERLIANI	KASI PEMERINTAHAN LUMBANG	
105.	WISMA ROMANTI, S.Pd.	KAUR UMUM UWIE	
106.	NORFAHRINA	STAF KEUANGANSIMPANG LAYUNG	
107.	ANDI NASRULLAH	KASI PEMERINTAHAN SANTUUN	
108.	IDA KASIH	KAUR UMUM MANGKUPUM	
109.	LATIFAH	KAUR UMUM PALAPI	
110.	IRWAN	KASI PEMERINTAHAN BINJAI	
111.	MAHRITA	STAF UMUM SALIKUNG	
112.	HADIANSYAH	KASI PELAYANAN SEI. KUMAP	
113.	ANIAH	SEKDES SOLAN	JARO
114.	H.YANSYAH. A	KADES LANO	
115.	SUGIANOR	KADES TERATAU	
116.	PENI RUSNAH YULIDA	KASI KESRA GARAGATA	
117.	SYAIPULLAH	KASI PEMERINTAHAN PURUI	
118.	WAHYU	KASI PEMBANGUNAN NAMUN	
119.	KARIANA PUTRI UTAMA	KASI PEMERINTAHAN NALUI	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
120.	FAJRI RAHMAN	KASI PEMERINTAHAN MUANG	
121.	NORIAN TO	KASI PEMERINTAHAN JARO	

 BUPATI TABALONG,


 ANANG SYAKHFIANI 